

UPAYA UNDP (*UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME*) DALAM MEMAJUKAN DEMOKRASI DI MYANMAR

Oleh:

Muslina

Pembimbing : Irwan Iskandar, S.IP. MA

Email: muslinamaurha@gmail.com

Bibliografi : 3 Jurnal, 19 Buku, 1 Skripsi, 11 Website, 6 Dokumen

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research explains about the efforts of UNDP in progressing democracy for Myanmar. Myanmar is a country governed by the rule of the military junta during the approximately fifty years. The presence of UNDP in Myanmar is to advance democracy in Myanmar previously are stagnant. This analysis aims to determine what the steps of UNDP to progress democracy in Myanmar.

The theory in this research is the theory of democratic transition, which leads to the democratization process of the shift from an authoritarian government to the democratic government that passes through a complex path, including the transition that took place in Myanmar. The Analysis of this research used data collection techniques, both qualitative data and theoretical data.

Based on the result of UNDP and Democracy in Myanmar are to accommodate the entire interest, either from the Government or from the party of Myanmar pro-democracy group democracy in the form of dialogue, strengthening local government, as well as provide technical assistance, facilitate and support the financial investments as well as strengthen the educational system.

Keywords: *UNDP, Myanmar, Progress, Democracy*

PENDAHULUAN

Myanmar (sebelumnya bernama Burma)¹ merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dan terkenal dengan isu pelanggaran HAM dan Demokrasi. Negara ini telah puluhan tahun dipimpin oleh

pemerintahan junta militer yang dikenal dengan sebutan SPDC (*The State Peace and Development Council*).² SPDC merupakan perubahan dari SLORC (*State Law and Order Restoration Council*) sejak tanggal 18 September 1997. Junta militer telah berkuasa di Myanmar sejak terjadinya

¹ Alan Collins. 2003. *Security and Southeast Asia : Domestic, Regional and Global Issues*. Singapore: ISEAS, hlm.27.

² Burma Country Profile. Diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country_profiles/1300003.stm pada 09 September 2015.

kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962 sampai Jenderal Than Shwe. Jenderal Than Shwe mulai mengambil posisi kepemimpinan di Myanmar dimulai sejak tahun 1992 sampai dengan perubahan konstitusi baru dibuat pada tahun 2008. Ketika dalam penguasaannya, kebijakan junta militer tetaplah sama, yakni menghilangkan nilai-nilai demokrasi dan menggantikannya dengan tatanan yang bersifat sentralistik dan otoriter. Nilai-nilai demokrasi yang telah diabaikan junta militer tersebut menyebabkan pelanggaran HAM menjadi hal biasa di Myanmar, yang pada akhirnya pihak sipil hanyalah sebagai penonton dan tidak terlibat menciptakan demokrasi partisipatoris.

Demokrasi di Myanmar dapat dianggap sebagai demokrasi yang mengalami kebekuan atau stagnan. Artinya terdapat penerapan demokrasi, namun semangat demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan serta peran utama kepada pihak sipil menjadi tidak ada. Bahkan junta militer yang mengambil alih kekuasaan, mengendalikan semua sistem pemerintahan. Sementara masyarakat sipil yang berupaya mewujudkan demokrasi melalui supremasi sipil mengalami penekanan yang sangat luar biasa, dimana pemilu dilakukan tetapi peserta yang melakukan pemilu adalah partai politik bentukan junta militer untuk mempertahankan kekuasaan. Sejak junta militer memerintah di Myanmar tahun 1962, banyak sekali terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer. Seperti tidak adanya pengadilan yang independen dan juga junta militer menekan para aktivitas politik oposisi. Sehingga junta militer dapat dengan bebas berkuasa. Di samping itu pula, pemerintah junta militer membatasi akses internet dan hubungan dengan dunia internasional

sehingga masyarakat Myanmar dapat dikontrol sepenuhnya oleh junta militer. Semua itu merupakan serangkaian kebijakan junta militer yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dibawah kontrol pemerintahan junta militer. Salah satu sorotan masyarakat internasional yaitu terkait dengan penahanan pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi. Tokoh ini telah mengalami penahanan selama 20 tahun lebih akibat seruan demokrasi yang begitu gencar dilakukan bersama para pengikutnya. Akibat dari tindakan pemerintahan junta militer ini pada akhirnya memunculkan perhatian masyarakat internasional. Bahkan berbagai desakan muncul atas pelanggaran HAM tersebut. Desakan dan ancaman internasional atas Myanmar ini secara tidak langsung membawa dampak buruk bagi situasi dan kondisi yang berada di dalam negeri Myanmar itu sendiri. Dampak dari sanksi ekonomi negara-negara Barat seperti, AS (Amerika Serikat) dan UE (Uni Eropa) selama 20 tahun lebih telah membuat perekonomian di Myanmar semakin tidak berkembang dan terpuruk. Pengucilan Myanmar dari pergaulan dunia dan tekanan internasional ternyata berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat secara keseluruhan. Sehingga proses demokratisasi dan perdamaian justru semakin sulit terlaksana. Atas berbagai ancaman dan desakan yang muncul terhadap Myanmar, dan menyadari akibat dari tekanan domestik dan internasional membuat Myanmar semakin terpuruk, pada akhirnya pemerintahan Myanmar mulai melakukan demokratisasi. Hal ini yang telah dilakukan oleh pemerintahan Myanmar, sejak kepemimpinan Jenderal Thein Sein pada Januari 2011. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, pemerintahan Myanmar menyelenggarakan pemilu (pemilihan umum) yang adil dan

dihadiri oleh para pengamat internasional. Myanmar telah sekian kali mendapatkan kegagalan dalam melaksanakan pemilu, namun saat ini negara yang puluhan tahun dipimpin oleh rezim militer, telah serius melakukan transformasi politik dalam rangka mendorong terwujudnya demokratisasi. Upaya demokratisasi ini telah muncul sejak kepemimpinan Thein Sein pada tanggal 4 Januari 2011. Sejak kepemimpinan jenderal Than Shwe digantikan oleh Jenderal Thein Sein sebagai presiden di Myanmar, berbagai perubahan positif di dalam negeri kerap terjadi. Salah satunya yaitu terkait cara pandangannya dalam mereformasi politik yang cukup terkenal di Myanmar.

Dalam rangka membangun demokrasi, Thein Sein berupaya melakukan hubungan lebih dekat dan konsolidasi dengan para pemimpin oposisi, membebaskan para tahanan politik, dan menjalin sebuah perdamaian dengan etnis lainnya. Kegiatannya sebagai seorang pemimpin pemerintahan telah membuktikan adanya sebuah keseriusan dalam mereformasi politik, sekaligus menjalin hubungan kerjasama dengan para pemimpin oposisi di bawah bendera partai NLD (*National League Democracy*). Sehingga ketika pemerintahan Myanmar memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu pada tanggal 1 April 2012 sebagai wujud demokratisasi, pihak kelompok oposisi secara langsung menyetujuinya. Pemilu yang diselenggarakan secara adil dan transparan serta dihadiri oleh pemantau komunitas internasional merupakan salah satu upaya rezim militer Myanmar dalam melakukan demokratisasi. Hasil dari pemilu tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pada saat itu Aung San Suu Kyi telah mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat Myanmar. Termasuk juga

dari kalangan partai NLD yang selalu mendukung pemimpin oposisi tersebut.

Salah satu negara di Asia Tenggara yang dapat dikatakan masih berada dalam kondisi belum stabil keadaan dalam negerinya, baik dari segi politik maupun pemerintahan terutama demokratisasinya adalah Myanmar. Tidak hanya belum stabil di dalam negeri, Myanmar juga tidak mampu secara ekonomi. Pembangunan di Myanmar pun dapat dikatakan masih rendah kualitas maupun kuantitasnya. Rakyatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi Myanmar, yang bernama Burma ketika awal kemerdekaannya, yang masih rendah kualitas dan kuantitas pembangunannya ini sangat kontras dengan misi utama UNDP, yakni mewujudkan negara yang mandiri (*self reliance*) karena hingga saat ini Myanmar masih belum merupakan negara yang mandiri dari segala sisi. Namun bukan berarti UNDP tidak berbuat apa-apa untuk membantu pembangunan di Myanmar, terutama pada masa awal berdirinya Myanmar. UNDP telah melakukan berbagai upaya untuk membantu pembangunan di Myanmar (yang untuk selanjutnya disebut Burma, karena ketika UNDP bekerja, negara tersebut belum mengalami pergantian nama menjadi Myanmar).

UNDP merupakan salah satu lembaga tinggi PBB sehubungan dengan peningkatan permintaan akan bantuan pembangunan di bidang bantuan teknis dan finansial. Pada mulanya, UNDP hadir untuk memenuhi tujuan dari PBB sendiri, yaitu “*to achieve international cooperation in solving international problem of an economic, social, cultural, or humanitarian character*” dan untuk mewujudkan “*higher standard of living, full employment and conditions of economic and social progress and development*”. Kedua tujuan PBB itu dicapai UNDP melalui pemberian bantuan teknis pada negara-negara berkembang, demi terciptan-

ya kesejahteraan dunia. Dalam membantu pembangunan negara berkembang, kerjasama dalam bentuk pemberian bantuan teknis (*technical aid*) sangat diperlukan dan esensial perannya. Bantuan teknis tersebut dapat membantu negara berkembang untuk mencapai *self reliance* dengan memfasilitasi dan mendukung investasi, pembangunan sumber daya manusia, riset dan pelatihan, dan dengan memperkuat kapabilitas nasional untuk pembangunan negara tersebut.³

Burma mempunyai hak untuk meminta bantuan teknis pada PBB melalui UNDP, dan hal tersebut dilakukan Burma pada awal tahun 1970 an, ketika Burma menyetujui upaya UNDP untuk melakukan rencana pembangunan selama 20 tahun, yang dibagi menjadi lima Rencana Empat Tahun (*Four Year Plans*). Saat itu diproyeksikan Burma akan mendapat bantuan dana sebesar 500 juta dollar Amerika selama pelaksanaan lima Rencana Empat Tahun tersebut. Rencana Empat Tahun itu sendiri mulai dilaksanakan pada Periode Pertama yaitu tahun 1973-1977 dan direncanakan selesai pada tahun 1989. Rencana Empat Tahun itu sendiri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh BSPP (*Burma Socialist Programme Party*), partai yang ketika itu berkuasa di Burma. Perencanaan pada level makro dilakukan oleh Menteri Perencanaan dan Keuangan Burma, dan fungsi operasional diserahkan pada Departemen Perencanaan (*Planning Department*). Periode Pertama CPI (*First Country Programme*) bertujuan untuk membantu pemerintah Burma untuk melakukan riset sehubungan dengan perencanaan pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, ilmu kelautan dan berbagai teknologi mineral terbaru.

³ Department of Public Information United Nations. 1989. *Basic Facts about the United Nations*. New York: United Nations Publications, hlm. 100.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa Organisasi Internasional dengan konsep transisi demokrasi. Sebuah tanda dimulainya masa transisi adalah ketika pemerintahan otoriter dengan alasan apapun mulai memodifikasi peraturan-peraturan mereka sendiri sebagai jaminan yang lebih kuat bagi hak-hak individu dan kelompok, proses tersebut disebut liberalisasi. Menurut Samuel P. Huntington, proses demokratisasi dari rezim non-demokratis ke system politik yang lebih demokratis terbagi dalam beberapa proses, meliputi :

1. Transformasi atau reforma yaitu proses demokratisasi terjadi ketika elit yang berkuasa melakukan negosiasi dan memelopori perwujudan demokrasi.
2. Replacement yaitu proses demokrasi terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokratisasi dan rezim otoriter digulingkan. Demokrasi dapat menciptakan harmoni di dalam negeri sebab rakyat ditempatkan sebagai poros politik,

Faktor kekuatan junta militer menjadi poin signifikan yang memisahkan perbedaan kekuatan otoriter pemerintah dan kekuatan masyarakat yang pro-demokrasi.

Secara sistemik, transisi demokrasi menjadi keniscayaan yang ingin dicapai dalam suatu masyarakat negara untuk mengakhiri rezim otoriter berkuasa yang mengesampingkan hak-hak warga negara, menegakkan system tiraninya tanpa adanya ruang dan melibatkan masyarakat negara secara terbuka menuju pemerintahan yang menjunjung tinggi suara rakyat, sistem politik yang terbuka serta menempatkan hak asasi manusia di tempat yang sama. Dengan kata lain, transisi demokrasi ini muncul karena adanya suatu pengaruh rezim otoriter oleh penguasa yang memiliki kekuatan besar atau militer yang menancapkan pengaruhnya secara dominan tanpa menghiraukan harmoni antara pemerintah dan masyarakat negara. Dalam

situasi rezim otoriter, kecenderungan pemerintah yang sedang berkuasa menunjukkan eksistensi kualitas kekuatannya kepada masyarakat melalui instrument militer. Dimana kekuatan militer cenderung ditonjolkan untuk membendung setiap perlawanan yang muncul sebagai respon dari sistem pemerintahan yang berkuasa dengan sewenang-wenang.

Faktor kekuatan junta militer menjadi poin signifikan yang memisahkan perbedaan kekuatan otoriter pemerintah dan kekuatan masyarakat yang pro-demokrasi. Yang terjadi kemudian adalah jatuhnya banyak korban dari masyarakat sipil sebagai akibat dari benturan vertical yang tidak sepadan.

Dalam menganalisa kasus ini, penulis menggunakan perspektif liberalisme, dimana kebebasan individu adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Kalangan liberal mempercayai kebebasan yang diperoleh oleh individu dapat mendorong pada kemajuan kualitas suatu individu.

PEMBAHASAN

UNDP (*United Nation Development Programme*) dibentuk pada tahun 1965 dan merupakan penggabungan dua organisasi yang sudah ada sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB). UNDP merupakan organisasi yang paling besar di antara organisasi-organisasi khusus PBB dan merupakan organisasi yang memiliki peran yang paling penting terhadap negara berkembang. Pusat kegiatannya berada di New York City, Amerika Serikat. Anggota UNDP sebanyak 165 negara dan di dalamnya terdapat negara pendonor, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda, Norwegia, Swedia, Uni Eropa dan Komisi Negara Eropa. UNDP didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-

negara berkembang. Bantuan tersebut berupa tenaga ahli, penasihat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan.

UNDP merupakan salah satu Program PBB terkait ECOSOC (*Economy and Social Council*) yang dibentuk untuk memberikan bantuan, baik secara teknis maupun secara finansial pada negara-negara yang dianggap layak mendapatkan bantuan. UNDP didirikan untuk memenuhi keinginan masyarakat dunia berkembang yang menginginkan adanya badan yang dapat memberikan bantuan pembangunan bagi mereka. UNDP juga bertujuan menciptakan pembangunan yang merata di seluruh negara anggota PBB, memberi bantuan pada negara-negara anggota PBB yang masih lemah dalam hal pembangunan untuk kemudian mendorong terciptanya kemandirian bagi negara anggota PBB.

UNDP merupakan salah satu lembaga tinggi PBB sehubungan dengan peningkatan permintaan akan bantuan pembangunan di bidang bantuan teknis dan finansial. Pada mulanya, UNDP hadir untuk memenuhi tujuan dari PBB sendiri, yaitu "*to achieve international cooperation in solving international problem of an economic, social, cultural, or humanitarian character*" dan untuk mewujudkan "*higher standard of living, full employment and conditions of economic and social progress and development*". Kedua tujuan PBB itu dicapai UNDP melalui pemberian bantuan teknis pada negara-negara berkembang, demi terciptanya kesejahteraan dunia. Dalam membantu pembangunan negara berkembang, kerjasama dalam bentuk pemberian bantuan teknis (*technical aid*) sangat diperlukan dan esensial perannya. Bantuan teknis tersebut dapat membantu negara berkembang untuk mencapai *self reliance* dengan memfasilitasi dan mendukung investasi, pembangunan sumber daya manusia, riset dan pelatihan, dan dengan mem-

perkuat kapabilitas nasional untuk pembangunan negara tersebut.⁴

Bantuan teknis yang diberikan juga berfokus pada usaha perbaikan perumahan, fasilitas umum, serta pelayanan sosial. Semuanya dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan (*living conditions*) di negara berkembang, untuk membantu pembangunan kapasitas pembangunan nasional, serta untuk membantu negara tersebut dalam berbagai masalah sehubungan dengan kependudukan. Urgensi akan bantuan teknis bagi negara berkembang inilah yang kemudian mendorong PBB untuk mendirikan suatu badan yang berfokus pada usaha perbaikan kondisi pembangunan negara-negara berkembang.

Tugas- Tugas UNDP

Adapun tugas-tugas UNDP dalam memajukan demokrasi di Negara Myanmar, yakni:

1. Eksekusi survey dan berbagai studi untuk mengetahui nilai ekonomi dari sumber daya alam suatu negara dan untuk menemukan potensi-potensi lain dari negara tersebut demi meningkatkan output negara dan distribusi barang dan jasa yang lebih luas.
2. Memperkuat sistem pendidikan dari sekolah dasar sampai tingkat universitas, serta mendukung berbagai instruksi teknis dan profesional, dari pelatihan berbasis orientasi kerja (*work oriented*) sampai pada berbagai spesialisasi studi.
3. Membangun fasilitas untuk melaksanakan riset teknologi modern untuk mengatasi masalah pembangunan, serta untuk mendistribusikan penemuan-penemuan baru dan berbagai teknologi produksi.

⁴Department of Public Information United Nations. 1989. *Basic Facts about the United Nations*. New York :United Nations Publications, hlm. 100.

4. Memperbaharui kapabilitas ekonomi nasional dan perencanaan pembangunan sosial negara bersangkutan.⁵

Kendala Penegakan HAM di Myanmar

Kendala penegakan HAM di Myanmar terletak kepada sikap Pemerintah Junta militer Myanmar yang tidak mau melakukan dialog, diskusi, maupun bertukar strategi tentang arah perubahan dan kebijakan nasional Myanmar ke depan dengan kelompok oposisi, khususnya kelompok pro-demokrasi, dan juga menanggapi secara setengah hati berbagai permintaan dan desakan dari dunia internasional yang meminta agar Pemerintah Junta militer Myanmar mengakhiri segala bentuk kekerasan, membebaskan para tahanan politik dan aktifis gerakan pro-demokrasi serta masyarakat sipil yang ditahan pada rangkaian aksi demonstrasi anti pemerintah, dan memulai sebuah proses transisi politik dan konsolidasi demokrasi.

Walapun dalam beberapa hal, Pemerintah Myanmar menyatakan kesiapannya untuk melakukan sebuah transisi politik dan konsolidasi demokrasi, yang dituangkan dalam *7-step roadmap to democracy*, yang dimulai melalui pembentukan Konvensi Nasional untuk Konstitusi baru Myanmar, referendum untuk Konstitusi baru Myanmar, serta rencana digelarnya pemilu dengan sistem multi partai pada tahun 2010, tetap saja dalam prosesnya Pemerintah Junta militer Myanmar membatasi keterlibatan kelompok-kelompok oposisi, khususnya kelompok pro-demokrasi. Kalaupun pada akhirnya semua elemen gerakan dan politik di Myanmar ter-

⁵ Ibid

libat dalam proses tersebut, pemerintah Myanmar tetap membatasi peran dari kelompok-kelompok di luar kelompok pemerintah. Selain itu, sikap pemerintah Myanmar yang hingga saat ini tidak mau membebaskan seluruh tahanan politik dan mereka yang ditahan akibat melakukan atau terlibat berbagai aksi demonstrasi anti pemerintah, menunjukkan sikap pemerintah yang belum sepenuhnya membuka diri terhadap kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat sebagai hak yang dijamin oleh hukum dan perjanjian internasional. Salah satu unsur demokrasi yaitu kebebasan untuk berserikat dan berkumpul (berorganisasi), yang juga merupakan salah satu hak yang dijamin oleh hukum dan perjanjian internasional, juga masih belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah Myanmar. Hal ini ditunjukkan dengan hanya diperbolehkannya NLD membuka dan melakukan aktifitas politiknya, sedangkan partai-partai lain (mengacu kepada pemilu Myanmar tahun 1990), masih tidak diperbolehkan untuk membuka kantor dan melakukan aktifitas politik. Sikap ini juga menunjukkan tidak maunya Pemerintah Junta militer Myanmar mengakomodir dan memberikan ruang bagi saluran aspirasi politik kelompok minoritas, mengingat partai-partai politik di luar NLD, pada pemilu tahun 1990, rata-rata hanya memperoleh suara sekitar 2-11%. Sikap-sikap pemerintah yang belum mau membuka diri sepenuhnya terhadap penegakan HAM dengan alasan perlu adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah kondisi masyarakat dan negara dimana demokrasi dan HAM dapat berjalan dengan baik, dan untuk menjaga proses tersebut, perlu adanya pengawasan dan pengaturan dari pemerintah yang kuat, dalam hal ini pemerintahan militerlah yang mampu menjalankan tanggung jawab tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *discipline-flourishing democracy* yang dicanangkan oleh pemerintah, yang pada

akhirnya membuat proses penegakan HAM sulit untuk dilakukan di Myanmar, atau paling tidak masih membutuhkan waktu yang panjang agar penegakan HAM dan demokrasi yang sebenarnya bisa terwujud di Myanmar.

Upaya yang dilakukan Myanmar dengan adanya Kebijakan PBB lewat UNDP

Mengakomodir Kepentingan Myanmar

Semenjak berkuasanya pemerintah junta militer Myanmar, kebebasan politik dan demokrasi masyarakat Myanmar dikekang. Penguasaan penuh negara beserta sendi-sendi kehidupan masyarakat Myanmar oleh pemerintah junta militer, telah menimbulkan keprihatinan dunia internasional, salah satunya adalah PBB. Masalah HAM di Myanmar pun sebenarnya merupakan sebuah masalah yang sudah muncul semenjak pemerintah junta militer Myanmar berkuasa, salah satu aspek tindakan pemerintah junta militer Myanmar yang dianggap dunia internasional sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM adalah tindakan pemerintah dalam mengatasi berbagai gelombang protes anti pemerintah serta berbagai aksi-aksi demonstrasi damai yang terus berlangsung hingga saat ini, mulai dari aksi yang diorganisir oleh mahasiswa, kelompok pro-demokrasi, hingga aksi demonstrasi yang dipelopori oleh para biksu. PBB dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendorong penegakan HAM di Myanmar, yang didasarkan atas *Universal Declaration of Human Rights* beserta perjanjian dan traktat-traktat internasional yang mengikutinya. Dengan dasar tersebut maka PBB memiliki sebuah pandangan tersendiri dalam melihat situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar yang secara jelas terlihat dari beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh PBB hingga saat ini.

Pelapor Khusus untuk situasi HAM di Myanmar lewat UNDP, bersama dengan Pelapor Khusus untuk hakim dan pengacara

independen, Pelapor Khusus untuk pelaksanaan dan perlindungan hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara bebas, Pelapor Khusus untuk situasi para penegak HAM dan Pelapor Khusus untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, menyalahkan beberapa hukuman dan pengadilan yang tidak adil di Myanmar. Pada tanggal 14 Januari 2009, seorang mahasiswa berusia 20 tahun dijatuhi hukuman 104 tahun penjara. Saat ini di Myanmar masih terdapat sekitar 2,100 tahanan tidak bersalah yang masih belum dibebaskan oleh pemerintah Myanmar. Sebagian besar dari mereka adalah mereka yang terlibat dalam berbagai aksi anti pemerintah. Para tahanan ini ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas, dan ditahan tanpa terlebih dahulu menjalani proses pengadilan, bahkan jika ada proses pengadilan, maka pengadilan tersebut sudah dapat dipastikan bersifat tertutup dan tidak adil. Dalam permintaan yang ketiga, yaitu menghapuskan segala bentuk larangan terhadap aktifitas politik masyarakat dan menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat di depan umum, Pemerintah Junta militer Myanmar juga belum dapat melankan dengan sepenuhnya. Kebebasan berekspresi dan berpendapat, sama halnya dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemilu 2010 dan telah diabadikan didalam Konstitusi baru Myanmar. Pada paragraf 8 pembukaan Konstitusi baru Myanmar dinyatakan tentang keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Pada Pasal 6 paragraf (d) Konstitusi baru Myanmar dinyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar dari negara adalah penerapan sistem demokrasi multi partai yang benar-benar mengalir dan disiplin. Selanjutnya pada Pasal 406 paragraf (a) dan (b) Konstitusi baru Myanmar dinyatakan bahwa partai politik harus memiliki hak berorganisasi dan mengorganisir secara bebas dan untuk berpartisipasi dan berkompetisi didalam pemilihan umum. Terakhir, pada Pasal

354 Konstitusi baru Myanmar dinyatakan bahwa setiap warga negara harus diberi kebebasan untuk berekspresi dan menerbitkan pendirian/keyakinan dan pendapat mereka dengan bebas, untuk berkumpul dengan damai tanpa adanya senjata dan untuk membentuk asosiasi dan organisasi. Meskipun demikian, sekitar 16 jurnalis dan blogger di Myanmar masih berada di dalam tahanan.⁶

Salah satu upaya UNDP di Myanmar adalah untuk mengakomodir seluruh kepentingan, baik dari pihak pemerintah Myanmar, maupun dari pihak kelompok pro demokrasi. Kepentingan tersebut diakomodir baik dalam bentuk dialog, sebagai bentuk fasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2007, PBB mengirimkan Pelapor Khususnya yakni Paulo Sergio Pinheiro untuk melakukan kunjungan ke Myanmar. Selama dalam kunjungannya tersebut, Paulo Sergio Pinheiro menemukan bahwa dalam periode 26-29 September 2007, pasukan keamanan, termasuk tentara dan polisi anti huru-hara, telah menggunakan kekuatan yang berlebihan melawan masyarakat sipil. Paulo menyimpulkan, bahwa berdasarkan berbagai laporan yang masuk yang disertai dengan video dan foto-foto, maka dapat diyakini setidaknya terdapat 31 orang tewas dalam peristiwa pembubaran para demonstran sepanjang bulan September- Oktober 2007, termasuk 15 orang korban meninggal dunia yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah Myanmar. Paulo meyakini bahwa adanya keterlibatan dari anggota *Union Solidarity, Development Assesment*, dan milisi Swan Ah Shin, memberikan kontribusi besar bagi penggunaan kekuatan berlebihan dalam menghadapi para demonstran yang sedang melakukan aksi secara damai.

⁶ Khanisa Krisman: Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar. Diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/en/column/politica-international> pada tanggal 11 Desember 2015.

Menurut Paulo, berdasarkan kepada laporan yang dapat dipercaya, sekitar 3.000 sampai 4.000 orang ditahan sepanjang bulan September-Oktober, dan sekitar 500 dan 1000 orang masih ditahan sampai dengan bulan Desember 2007.⁷

Sedangkan pada tahun 2008, PBB kembali mengutus utusan khususnya melalui UNDP dalam rangka mengurus urusan demokrasi dan HAM di Myanmar dengan melakukan perundingan bersama Pemerintah Junta Militer di Myanmar untuk menyelesaikan krisis HAM dan demokrasi. Pelapor Khusus yang dikirim PBB dengan masa kerja selama 3 bulan memiliki tugas tidak hanya menginventarisir masalah di Myanmar, tetapi juga melakukan berbagai dialog dengan pemerintah Myanmar dan juga kelompok-kelompok pro demokrasi dan para elit partai di Myanmar. Utusan Khusus Ibrahim Gambari sebagai negosiator, melakukan tugas utamanya, yaitu membuka dialog dengan pemerintah Myanmar untuk mencari jalan keluar bersama dari permasalahan HAM di Myanmar. Utusan yang dikirim memiliki tugas tidak hanya menginventarisir masalah di Myanmar, tetapi juga melakukan berbagai dialog dengan pemerintah Myanmar dan juga kelompok-kelompok prodemokrasi dan para elit partai di Myanmar.

Hasil yang dilaporkan oleh Utusan Khusus PBB lewat UNDP yakni, pernyataan pemerintah Myanmar yang bersedia melakukan dialog dengan Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi dan perdamaian, yang

difasilitasi oleh Utusan Khusus PBB. Dalam pernyataan pemerintah Myanmar, pasca pertemuan dengan Ibrahim Gambari, bahwa Pemerintah Junta Myanmar akan menggelar konvensi nasional untuk menentukan wakil-wakil yang akan menyusun konstitusi baru, serta janji pemerintah Myanmar yang akan menggelar pemilu pada tahun 2010. Maka, untuk mengakomodir seluruh kepentingan, baik dari pihak pemerintah Myanmar, maupun dari pihak kelompok pro demokrasi akan berjalan secara positif dengan bantuan UNDP, jika faktor berikut ini dipertahankan, yaitu:

1. UNDP tetap memposisikan diri sebagai jembatan antara Myanmar dengan dunia internasional, dan mampu menyuarakan dan menggambarkan berbagai perkembangan positif yang dicapai pemerintah Myanmar dalam proses transisi politik yang sedang dijalankan. Di sisi lain, pemerintah Myanmar terus membuka diri terhadap berbagai masukan dari PBB terkait dengan proses transisi politik yang sedang dijalankan,
2. Penurunan tekanan dari dunia internasional terhadap Pemerintah Junta militer Myanmar terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dijalandkannya,
3. Terus terkonsolidirnya seluruh elemen kekuatan nasional di Myanmar yang mendukung berjalannya proses transisi politik di Myanmar, dengan PBB sebagai penjamin sekaligus pengawas independen proses transisi politik di Myanmar (atas dasar kesepakatan seluruh pihak.
4. Terbukanya akses masuk dan keamanan bagi pihak-pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang akan memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus melakukan pembangunan demokrasi masyarakat sipil pada tataran lokal dalam rang

⁷ Human Rights Council, "Human Rights Situation That Require the Council's Attention: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Paulo Sergio Pinheiro, mandated by resolution 6/33 of the Human Rights Council", arsip pada <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/113/88/PDF/G0811388.pdf?OpenElement>, diakses tanggal 09 Desember 2015.

mempersiapkan masyarakat Myanmar memasuki iklim demokrasi serta dalam rangka mempersiapkan dasar-dasar penegakan HAM pada tataran lokal, serta

5. Terbangunnya komitmen dan kesepakatan yang erat atas dasar saling menghormati dan rasa saling percaya antara Pemerintah Junta militer Myanmar dengan PBB untuk melakukan proses transisi politik yang sebenarnya di Myanmar, dalam kerangka tindak lanjut berbagai hasil-hasil yang sudah dicapai oleh pemerintah seperti pencabutan serta perubahan berbagai peraturan hukum yang bertentangan dengan Konstitusi baru Myanmar. Jika faktor-faktor tersebut di atas, yang saat ini sudah terpenuhi, dapat terus dipertahankan eksistensinya, maka proses transisi politik di Myanmar akan dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap proses penegakan HAM di Myanmar. Myanmar telah melewati beberapa perubahan penting dalam beberapa tahun terakhir dan akan terus menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pelaksanaan dan perlindungan terhadap HAM di Myanmar akan terus menjadi tantangan utama bagi Myanmar di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, konsep tradisional tentang saling ketergantungan dan tak terpisahkan antara hak-hak masyarakat sipil dalam budaya, ekonomi, politik, dan sosial, masih relevan untuk diterapkan. Transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil yang demokratis membutuhkan beberapa perubahan struktural untuk menjamin keterlibatan seluruh sektor masyarakat My-

anmar dalam proses transisi politik tersebut.⁸

1.3. Memperkuat Pemerintahan Lokal (*Local Governance*)

Dalam memperkuat pemerintahan lokal di Myanmar, UNDP melakukan implikasi kebijakan dan kerjasama pembangunan. Kebijakan internal dalam memperkuat pemerintahan lokal (internal) di Myanmar dilakukan melalui upaya reformasi politik dalam kabinet. Pada pemilu tahun 2015, terjadinya penguatan pada proses administratif dan kapasitas infrastruktur di Myanmar sehingga Myanmar memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan mengatasi masalah HAM yang berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan *Human Rights Council* yang merupakan “tanda awal” untuk Myanmar menuju pemerintahan demokratis demi memberikan fokus tujuan reformasi serta sarana untuk mengevaluasi terhadap kemajuan.

Dalam implementasinya, UNDP dan demokrasi di Myanmar telah melalui sebuah proses tinjauan konstitusional dan menjadi ukuran yang paling mendasar untuk menciptakan kemajuan. Komponen utama dari agenda reformasi dalam memperkuat pemerintahan lokal di Myanmar tercantum dalam Konstitusi Federalisme dan distribusi kekuasaan, struktur pemerintahan, peran militer dalam pemerintahan, pemilihan dan ke-layakan serta hak-hak dasar aturan hukum.⁹

⁸ United Nations General Assembly, “Situation of Human Rights in Myanmar”, dokumen no. A/63/341, hlm. 15-16

⁹Democratic Governance in Myanmar dalam <http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/SitrepDemocraticGovernanceAnalysisMyanmar-UNDP-2014-2015> diakses pada 11 Desember 2015.

Ruang lingkup dan sifat amandemen konstitusi tersebut akan membentuk arah reformasi ke masa akan datang bagi Pemerintahan Myanmar. Legitimasi politik berasal dari proses peninjauan akan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan reformasi pemerintahan yang demokratis. Sementara dua tahun periode dikelola untuk mengatur beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan visi menuju perubahan jangka panjang. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh UNDP dalam memperkuat pemerintahan lokal di Myanmar harus menjadi bagian dari rencana berkelanjutan yang memandang pemerintahan demokratis yang terus berkembang dengan cara menjamin perkembangan yang baik bagi Myanmar. Analisis berikut ditujukan untuk mendorong dialog tentang membangun pemerintahan yang demokratis di Myanmar melalui visi jangka panjang antara Pemerintah Myanmar dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan jangka pendek.¹⁰ Sejak pemerintahan yang demokratis di Myanmar, analisis situasi selesai pada tahun 2012 dan menjadikan Myanmar sebagai negara transisi dalam kerangka gelombang reformasi, yakni :

1. Reformasi politik dan demokrasi
2. Reformasi Ekonomi dan Sosial
3. Tata Pemerintahan dan reformasi administratif
4. Pengembangan sektor swasta.

Dalam hal ini, UNDP telah mengusulkan untuk melakukan kerjasama yang erat dengan Pemerintahan Lokal di tingkat negara atau wilayah. Pemetaan akan dimulai pada tahun 2013 dan 2014. Hasil tersebut akan memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan untuk pemulihan layanan dasar dan kebutuhan pemangku kepentingan, yakni pemerintah dan non-pemerintah dalam proses reformasi tersebut. Selain itu, proses pemetaan itu akan menciptakan sebuah *platform* dalam dialog antara pemerintah dan

masyarakat sipil pada isu-isu dalam pemerintahan.

4.5. Memperkuat Sistem Pendidikan

Ketimpangan gender di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara kondisi gender sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi objektif) di bidang pendidikan. Ketimpangan gender disebut juga permasalahan gender atau isu gender. Lebih lanjut kondisi normatif contohnya, kesempatan mengikuti pendidikan formal bagi laki-laki dan perempuan adalah sama.

Ketimpangan gender dalam hal pendidikan tersebut telah dirasakan oleh negara yang puluhan tahun dipimpin oleh pemerintahan junta militer, yaitu Myanmar. Myanmar merupakan negara termiskin di Asia Tenggara, namun meskipun negara termiskin Myanmar merupakan negara yang paling kuat dalam kekuasaan junta militernya. Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya rakyat Myanmar yang menderita akibat kekuasaan junta militer. Salah satunya di sektor pendidikan yang banyak mengalami diskriminasi dalam hal menempuh jenjang pendidikan ini. Dalam upaya mengurangi ketimpangan gender ini, UNDP Myanmar pada akhirnya melakukan sebuah program baru mengenai ketimpangan gender tersebut. Tujuan dari program Myanmar adalah untuk meningkatkan UNCT *Gender Theme Group* yang diketuai oleh UNDP untuk lebih mempromosikan kesetaraan gender secara efektif di Myanmar. Namun pada tanggal 2-3 Mei 2008, terjadi bencana Topan Nargis melan-

¹⁰ OpCit., Democratic Governance

da Myanmar. Daerah yang secara signifikan tercakup dalam program IPM UNDP. Oleh karena itu, ruang gerak pada proyek ini dimodifikasi untuk lebih fokus pada realitas yang baru dari program IPM Myanmar. Secara efektif program ini menekankan peningkatan kesetaraan gender di daerah pedesaan, untuk pengarusutamaan gender dalam merespon keadaan yang darurat dan persiapan sejak dini.[2] Namun berdasarkan dengan program yang telah disusun oleh IPM UNDP tersebut, tidak sebanding dengan data laporan MDG yang menjadi trend tahun 2005-2010. Data MDG tersebut telah memperbaiki kondisi kehidupan pembangunan nasional yang ada di Myanmar. Bahkan terdapat beberapa indikator yang menunjukkan arah perubahan yang signifikan, namun ada juga indikator yang malah berbanding terbalik dengan program MDG selama ini.

Pada dasarnya rasio jumlah anak perempuan ditingkat pendidikan dasar, atau biasa disebut *Indeks Paritas Gender*, merupakan rasio jumlah siswa perempuan yang terdaftar terhadap jumlah siswa laki-laki di sekolah dasar. Sedangkan indikator merupakan sebuah ukuran dari aksesibilitas pendidikan untuk seorang anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Secara keseluruhan menurut laporan Data MDG di Myanmar, rasio jumlah anak perempuan dalam menempuh pendidikan dasar tersebut menunjukkan **penurunan dari 96,1% menjadi 92,6% antara 2005 dan 2010**, dimana perubahan tersebut secara statistik tidak begitu signifikan. Hal ini masih dipengaruhi oleh data yang menunjukkan lebih tinggi persentase anak perempuan miskin 96,7%, di bandingkan anak-anak yang tidak

miskin yaitu sekitar 91%. Begitu juga dengan ukuran yang lebih tinggi di pedesaan sekitar 93,3% sedangkan perkotaan 89,9%. Jadi jika ditotalkan, perbandingan presentasi jumlah anak perempuan dalam menempuh pendidikan dilihat dari status kemiskinan dan strata mengalami penurunan dari tahun 2005-2010 sekitar 3.6%.[3] Begitupun dengan rasio tingkat **paling terendah** anak perempuan dalam pendidikan dasar di beberapa wilayah Myanmar seperti di Kayah (80.2%), Sagaing (82.3%), Mon (86%), dan Bago (86.6%). Kecenderungan penurunan ini ditemukan di kebanyakan wilayah Myanmar, meskipun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Demokrasi sampai saat ini dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat modern. Implementasi demokrasi contohnya melalui kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak individu yang mesti diperjuangkan. Pemerintah di negara manapun berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurangnya tengah berproses ke arah itu. Salah satu isu yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat internasional adalah mengenai perkembangan politik yang terjadi di Myanmar, khususnya menyangkut isu demokratisasi di negara tersebut.

Pengembangan demokrasi di suatu negara memang merupakan urusan domestik negara yang bersangkutan, tetapi fenomena hubungan internasional di era globalisasi saat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu

yang terjadi di suatu Negara, terlebih jika hal itu sudah menjadi bagian dari isu hubungan internasional, maka akan mendapat perhatian dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional beranggapan bahwa Myanmar tengah menghadapi persoalan serius dalam perkembangan situasi politiknya, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi tidak mendapatkan pengakuan yang layak dari rezim yang berkuasa, seperti yang tercermin antara lain dalam pemilu tahun 1990.¹¹

Myanmar merupakan sebuah Negara kecil di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta orang. Sejak memperoleh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948, Myanmar tidak pernah bebas dari pergolakan politik dan kudeta militer yang silih berganti. Dunia internasional mengetahui masalah ini karena Myanmar telah selama beberapa dekade di bawah rezim otoriter, sejak junta militer mengambil alih pemerintah melalui kudeta. Sejak tahun 1990 pemilihan umum yang telah dimenangkan oleh liga nasional untuk demokrasi. Myanmar adalah sebuah Negara yang masih dikuasai oleh rezim militer yang otoriter. Setiap gerakan demokrasi yang muncul akan mendapat perlawanan dari rezim yang berkuasa. Sistem politik yang berlaku di Myanmar memberikan ruang kepada rezim militer untuk bisa melemahkan berbagai gerakan perlawanan yang muncul dari masyarakat. Gerakan demokrasi di Myanmar masih tetap ada walaupun diketahui sebagai negara yang dikuasai oleh rezim militer. Seberapa pun derasnya arus demokrasi yang ingin diciptakan di Myanmar, maka pemerintahan junta militer yang berkuasa semakin keras pula untuk menghentikan

¹¹ Awani Irewati. 2007. *Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi*. Jurnal Penelitian Politik Vol.4 No.1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Politik.

gerakan tersebut, seperti rezim junta militer yang tidak menerima hasil pemilu pada tahun 1990 yang menempatkan partai *National League for Democrats*.

Jadi, hadirnya UNDP di Myanmar adalah untuk memberikan “warna” baru dalam sistem perpolitikan di Myanmar. Yang pada awalnya Myanmar diperintah oleh Pemerintahan Junta Militer yang otoriter selama lebih kurang 50 tahun kini diperintah oleh Presiden U Thein Sein dengan mengedepankan prinsip demokrasi. Tidak hanya memahami betapa begitu pentingnya nilai-nilai demokrasi itu, namun juga mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi demi memajukan masyarakat Myanmar dan Myanmar. Disini, tidak hanya dibutuhkan dukungan dari internal masyarakat Myanmar tetapi juga dukungan dari dunia internasional untuk menciptakan “sebuah konspirasi” baru di Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN

Amnesty International. 2004. *Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*. London: Amnesty International.

Department of Public Information United Nations. 1989. *Basic Facts about the United Nations*. New York : United Nations Publications.

Democratic Governance in Myanmar dalam <http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/SitrepDemocraticGovernanceAnalysisMyanmar-UNDP-2014-2015> diakses pada 11 Desember 2015.

United Nations Security Council Document 14 S-2007-14 on 12 January 2007 UNHRC. 2008. *“Human Rights Situation That Require Council’s Attention:*

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Paulo Sergio Pinheiro”, dokumen no. A/HRC/7/18 Human Rights Council, “Report of Special Rapporteur on the situation of Human Rights in Myanmar, Paulo Sergio Pinheiro, mandated by resolution 6/33 of the Human Rights Council”, no. A/HRC/7/24

JURNAL

Awani Irewati. 2007. *Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi*. Jurnal Penelitian Politik Vol.4 No.1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Politik.

Tom Kramer dalam “*Ending 50 years of Military Rule? Prospects for Peace, Democracy and Development in Burma*”. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) Report. November 2012. Diakses pada 25 September 2015.

Smith, Martin.1999. “*Burma - Insurgency and the Politics of Ethnicity*”, Zed Books,ISBN 978-1856496605.

BUKU-BUKU:

Collins Alan. 2003. *Southeast Asia : Domestic, Regional and Global Issues*. Singapore:ISEAS

Clive Archer. 1997. *International Organizations*. New York: Routledge.

Dahl, A Robert. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya, jilid 1*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ferrara, Federico.2003. “*Why Regimes Create Disorder: Hobbes's Dilemma during aRangoon Summer*”, The Journal of Conflict Resolution

Fong, Jack. 2008. “*Revolution as Development: The Karen Self-determination Struggle Against Ethnocracy (1949 - 2004)*”, Universal-Publishers. ISBN 978-1599429946

Gill Gramae. 1995. *Liberalization and Democratization in The Union and Rus-*

sia, Democratization. Vol 2 No. 3 Autumn.

Mas’oed Moehtar. 1990. *Disiplin dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta : LP3ES.

Peter Wilensky. 1993. “*UN’s Structure in Post Cold War Periode*” dalam Adam Roberts dan Benedict Kingsbury *United Nations, Divided World, The UN’s Roles in International Relations* . New York : Clarendon Press.

Priyambudi, Sulistiyanto. 1993. *Revolusi yang Tertunda*. Prisma No. 6. Jakarta.

Robert Jackson & Georf Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Robert H, Taylor. 1980. *Burma*, dalam Harold Crouch,”*Military Civilian Relation in Southeast Asia*”.Singapore: Koon Wah Printin

Rudy, T May. 1998. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Samuel Huntington. 1991. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Grafiti: Jakarta

Selverstein Josef. 1991. “*Myanmar’s (Burma’s) Six domestic Challenges in the 1990’s, Myanmar and the Wider Southeast Asia*”. KL ISIS.

Scott Burchill & Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. New York: St. Martin’s Press INC.

Smith, Martin.1999. “*Burma - Insurgency and the Politics of Ethnicity*”, Zed Books,ISBN 978-1856496605

Soe Saing. 1990. *United Nations Technical Aid in Burma, A Short Surve*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies

Ummarudin Masdar. 1999. *Membaca tentang pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Vincent Bodreau. 2004. Dalam “*Resisting Dictatorship: Repression and*

Protest in Southeast Asia". Cambridge University Press.

Yawnghwe , Chao-Tzang. 1995. *Burma: Depoliticization of the Political, Political Legitimacy in Southeast Asia: The Quest for Moral Authority*. Mutiah: Stanford University Press. ISBN 978-0804725606.

INTERNET ACCESS :

2013. Annual Report 2013. Asistense Associations for Political Prisoners. Dikutip dari: [http://www.aappb.org/Annual_Repport_2013\(Eng\).pdf](http://www.aappb.org/Annual_Repport_2013(Eng).pdf).
Burma Country Profile dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country_profiles/1300003.stm diakses pada 09 september 2015.

<http://www.peacebuilding.no/var/ezfl/site/storage/original/application/00a4e800d45def2a0a82e6f0f71eb3c8.pdf> diakses pada 09 September 2015.

Roger Lee Huang dalam "Rethinking Myanmar's Political Regime. 2012. *Military Rule in Myanmar and Implications for Current Reforms*". Working Paper Series. No 136. University of Hong Kong City. Diakses dari http://academia.edu/3184529/Rethinking_Myanmars_Political_Regime_Military_rule_in_Myanmar_and_implications_for_current_reforms pada 15 September 2015.

Situs Resmi PBB, "Overview, UN in Brief", arsip pada <http://www.un.org/Overview/uninbrief/> diakses tanggal 25 September 2015.

Situs Resmi PBB, "The General Assembly", arsip pada http://www.un.org/Over/uninbrief/chapter1_ga.html diakses pada 25 September 2015.

Situs Resmi PBB, "The Economic and Social Council", arsip pada <http://www.un.org/Overview/uninbrief/chapt>

[er1_sc.html](#), diakses tanggal 25 September 2015.

Situs Resmi PBB, "The Trusteeship Council", arsip pada http://www.un.org/Overview/uninbrief/chapter1_trusteeship.html, diakses tanggal 25 September 2015.

Situs Resmi PBB, "The International Court of Justice", arsip pada http://www.un.org/Overview/uninbrief/chapter1_icoj.html, diakses tanggal 25 September 2015.

Situs Resmi PBB, "The Secretariat", arsip pada http://www.un.org/Overview/uninbrief/chapter1_secretariat.html, diakses tanggal 27 September 2015.

The National Convention in Burma (Myanmar): An Impediment to the Restoration of Democracy. Diakses dari <http://www.ibiblio.org/obl/docs/LHR-Diller3.html> pada 20 September 2015.

US Bureau of East Asian and Pacific Affairs, "Burma", diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35910.htm> Desember 2008 pada 25 September 2015.